

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 18
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 1 Oktober 2020
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
Acara : Membahas:
1. Perijinan melalui Sistem Informasi Layanan Cepat (SILAT) serta prasarana dan sarana pelabuhan seluruh Indonesia, seperti pendangkalan alur dan kolam labuh/tambat labuh untuk kapal perikanan;
2. Kapal asing yang melakukan pelanggaran penangkapan ikan di wilayah NKRI, terutama Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Natuna serta WPP lainnya;
3. Program pelatihan masyarakat KP serta lulusan sekolah/politeknik kelautan dan perikanan yang berada dalam pembinaan KKP, dalam rangka peningkatan kemampuan di tengah pandemi COVID-19; dan
4. Lain-lain
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 35 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI

B. Hadir Pemerintah:

1. Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si. (Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan);
2. Dr. TB. Haeru Rahayu (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan); dan
3. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan).

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, membahas Perijinan melalui Sistem Informasi Layanan Cepat (SILAT) serta prasarana dan sarana pelabuhan seluruh Indonesia, seperti pendangkalan alur dan kolam labuh/tambat labuh untuk kapal perikanan; Kapal asing yang melakukan pelanggaran penangkapan ikan di wilayah NKRI, terutama Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Natuna serta WPP lainnya; dan Program pelatihan masyarakat KP serta lulusan sekolah/politeknik kelautan dan perikanan yang berada dalam pembinaan KKP, dalam rangka peningkatan kemampuan di tengah pandemi COVID-19, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk selalu menerapkan teknologi terkini dalam pengajuan perizinan kapal perikanan agar prosesnya berjalan dengan cepat, efisien, dan efektif.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan koordinasi dan pengecekan bersama Kementerian Perhubungan mengenai pelaksanaan pengukuran kapal perikanan di lapangan oleh pegawai khusus yang ditunjuk dengan metode satu atap, dalam rangka mengantisipasi terjadinya kecurangan laporan penurunan Gross Ton (*markdown*) oleh pemilik kapal perikanan. Hal ini akan mempermudah dan mempercepat proses validasi pengukuran Gross Ton kapal perikanan di atas 30 GT sebagai dasar kelengkapan dalam Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT).

3. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan modernisasi fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, mengingat setiap tahunnya jumlah kapal perikanan yang masuk ke pelabuhan perikanan terus bertambah dan bangunan pelabuhan serta pendukungnya perlu dilakukan peningkatan teknologi.
4. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan operasional dalam melayani nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap, termasuk menjaga ketersediaan dan kecukupan pasokan BBM melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) atau *Solar Packed Dealer* Nelayan (SPDN).
5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan peremajaan kapal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sudah usang/lama, sehingga pencegahan dan pengendalian *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* serta penanganan *Destructive Fishing* dapat berjalan secara optimal di wilayah perairan Indonesia, khususnya di daerah perbatasan.
6. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pembinaan berupa keterampilan (*skill*) serta bantuan sarana dan prasarana kepada Kelompok Masyarakat Pengawas Kelautan dan Perikanan (POKMASWAS) di kabupaten/kota yang mempunyai wilayah pesisir, agar keamanan dan kesejahteraannya terjamin.
7. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pengembangan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-270/MEN-KP/V/2019.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pendampingan dan pembinaan secara continue melalui pelatihan kepada masyarakat kelautan perikanan sampai benar-benar mandiri dan berhasil menjadi wirausaha sukses melalui fasilitasi pembiayaan dengan lembaga keuangan, minimal 3 (tiga) kali dalam setahun di daerah masing-masing dengan jumlah peserta maksimum 100 (seratus) orang per pertemuan.
9. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan sarana prasarana di seluruh Politeknik Kelautan Perikanan agar lulusannya dapat bersaing dan menjawab tantangan dunia internasional pada sektor kelautan perikanan.

10. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas terutama kepada anak pelaku usaha sektor kelautan perikanan mengenai adanya beasiswa di Politeknik Kelautan Perikanan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.40 WIB.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.

A-151

Plt. Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si.

Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

Dr. TB. Haeru Rahayu

Kepala Badan Riset dan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA.